KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : PDIP, PAN, dan PD Belum Serahkan AKD
Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

PDIP, PAN, dan PD Belum Serahkan AKD

KERANGKA KERJA

Hari ini DPR berencana menggelar rapat paripurna pengesahan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hingga tadi malam, ada tiga fraksi yang belum menyerahkan daftar nama pimpinan AKD yang menjadi hak mereka.

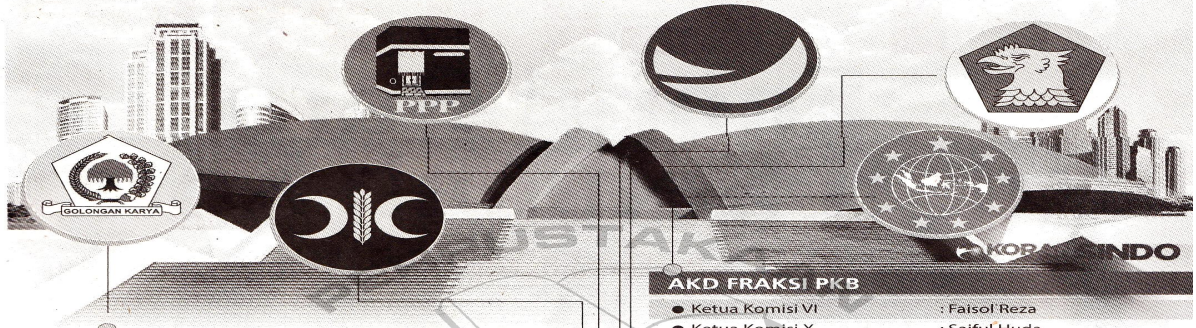

AKD FRAKSI PARTAI GOLKAR

Ketua Komisi I	: Meutya Hafid
Komisi II	: Ahmad, Doli Kurnia
Komisi XI	: Dito Ganinduto
Wakil Ketua Komisi II	: Adies Kadir
Wakil Ketua Komisi IV	: Dedi Mulyadi
Wakil Ketua Komisi V	: Ridwan Bae
Wakil Ketua Komisi VI	: Gde Sumarjaya Linggih
Wakil Ketua Komisi VII	: Alex Noerdin
Wakil Ketua Komisi VIII	: Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi IX	: Melki Laka Lena
Wakil Ketua Komisi X	: Hetifah Syaifudian
Wakil Ketua Badan Anggaran	: Muhidin Mohamad Said
Wakil Ketua MKD	: Andi Rio Idris Padjalangi

AKD FRAKSI PKS

Ketua MKD	: Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Wakil Ketua Komisi I	: Abdul Kharis
Wakil Ketua Komisi IX	: Anshori Siregar
Wakil Ketua Komisi X	: Abdul Fikri
Wakil Ketua BKSAP	: Mardani Ali Sera
Wakil Ketua BURT	: Dimyati Natakusuma
Wakil Ketua BAKN	: Ahmad Syaikhu

AKD FRAKSI PPP

Wakil Ketua Komisi II	: Arwani Thomafi
Wakil Ketua Komisi V	: Nurhayati
Wakil Ketua Komisi XI	: Amir Uskara
Wakil Ketua Badan Legislasi	: Ahmad Baidowi

AKD FRAKSI PKB

Ketua Komisi VI	: Faisol Reza
Ketua Komisi X	: Saiful Huda
Wakil Ketua Komisi II	: Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Ketua Komisi IV	: Daniel Johan
Wakil Ketua Komisi VIII	: Marwan Dasopang
Wakil Ketua Komisi IX	: Nihayatul Wafiroh
Wakil Ketua Komisi XI	: Fathan Subhi
Wakil Ketua Badan Anggaran	: Cucun A Syamsurijal
Wakil Ketua Badan Legislasi	: Ibnu Multazam

AKD FRAKSI GERINDRA

Wakil Ketua Komisi I	: Bambang Kristiono
Wakil Ketua Komisi III	: Desmond J Mahesa
Wakil Ketua Komisi IV	: Budi Jiwandono
Wakil Ketua Komisi V	: Ahmad Riza Patria
Wakil Ketua Komisi VI	: Mohammad Hekal
Wakil Ketua Komisi VII	: Gus Irawan Pasaribu
Wakil Ketua Komisi VII	: Laksamana Moekhlas Sidik
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga	: Novi Wijayanti
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan	: Habiburokhman

AKD FRAKSI NASDEM

Wakil Ketua Komisi 2	: Saan Mustopa
Wakil Ketua Komisi 3	: Ahmad Sahroni
Wakil Ketua Komisi 4	: Hasan Aminuddin
Wakil Ketua Komisi 5	: Syarief Alkadrie
Wakil ketua Komisi 6	: Martin Manurung
Wakil Ketua Komisi 11	: Achmad hatari
Wakil Ketua Baleg	: Willy Aditya
Wakil Ketua Banggar	: Rusdi Masse Mappasessu

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

JAKARTA – Dua puluh delapan hari berlalu sejak 575 anggota DPR dilantik pada 1 Oktober lalu, namun DPR belum juga bekerja. Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pun belum dibentuk. Bahkan masih ada tiga fraksi di DPR yang belum menyerahkan nama pimpinan komisi dan AKD-nya.

"PDIP, PAN, dan Demokrat (yang belum serahkan nama Pimpinan Komisi dan AKD)," kata Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto seusai rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Utut menjelaskan, sebenarnya PDIP sudah selesai dan tinggal menyerahkan nama-nama pimpinan komisi dan AKD itu ke pimpinan DPR yang masih ditunggu sampai Selasa (29/10) pagi. Namun, ia enggan membocorkan namanya. "*Wah*, itu bukan kewenangan saya. Tapi, *kan* tentu sudah ada di tangan Ibu Ketua (DPR/Puan Maharani)," terangnya. "Kalau ini, *kan* ditunggu sampai jam tujuh malam. Kalau fraksi kami sebenarnya sudah siap, tinggal ditaruh saja," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa pada rapat paripurna Selasa (29/10) besok akan mengesahkan keanggotaan komisi-komisi dan AKD. Khusus untuk pimpinan komisi dan AKD, akan disahkan di Komisi dan AKD masing-masing. "Kalau ada yang bisa besok abis paripurna penetapan pimpinan sesuai dengan hasil konsultasi pengganti Bamus sebelumnya, tinggal penetapan saja. Jadi penetapan setelah paripurna sampai bisa Rabu atau Kamis," terang Saan di kesempatan sama.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR telah memastikan nama-nama kader yang menduduki kursi AKD DPR RI. Sembilan kader yang dipilih sebagai pimpinan AKD didominasi legislator berpengalaman dengan usia relatif muda. "Kami telah memilih jajaran pimpinan AKD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Rata-rata berusia muda sebagai simbol jika kami ingin kepemimpinan AKD DPR ke depan lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujar Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Fathan Subchi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10).

Dia mengatakan, sesuai kesepakatan, PKB mendapatkan sembilan jatah kursi pimpinan AKD DPR RI periode 2019-2024, yakni dua kursi ketua di Komisi VI dan X, serta wakil ketua di Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi X, Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Legislasi. "Jatah komisi yang kami dapatkan pembidangannya sesuai dengan tiga prioritas program yang diamanatkan Muktamar Bali, yakni mendorong ekonomi kerakyatan, memajukan pendidikan, dan melakukan dakwah sosial," paparnya.

Fathan mengungkapkan nama-nama pimpinan AKD dari FKB di antaranya Faisol Reza yang menduduki kursi ketua Komisi VI dan Syaiful Huda sebagai ketua Komisi X. Kemudian Yaqut Cholil Qoumas sebagai wakil ketua Komisi II, Daniel Johan sebagai wakil ketua Komisi IV, Marwan Dasopang sebagai wakil ketua Komisi VIII, Nihayatul Wafiroh sebagai wakil ketua Komisi IX, Fathan Subchi sebagai wakil ketua Komisi XI, Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai wakil ketua Badan Anggaran, dan Ibnu Multazam sebagai wakil ketua Badan Legislasi.

"Kami bersama DPP PKB memilih nama-nama yang kami pandang mempunyai rekam jejak dan pengalaman sesuai dengan bidang komisi yang mereka pimpin masing-masing," ucapnya.

Politikus asal Jawa Tengah ini berharap agar para kader yang menduduki kursi pimpinan AKD bisa memberikan warna baru bagi perjalanan DPR lima tahun ke depan. Menurutnya, dengan pengalaman dan usia mereka yang dekat dengan kaum milenial, para pimpinan AKD dari PKB bisa lebih aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan kader sesuai dengan komisi dan bidang mereka masing-masing.

"Kami berharap para pimpinan AKD bisa memperjuangkan tiga prioritas PKB yang diamanatkan Muktamar Bali, utamanya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik melalui pendidikan berkualitas maupun peningkatan ekonomi kerakyatan," pungkasnya.

Sementara itu, Syaiful Huda membenarkan dirinya ditunjuk sebagai ketua Komisi X DPR. Rabu (30/10/2019), Huda akan resmi dilantik sebagai ketua Komisi X. Dalam tugasnya, Komisi X bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi), dan Badan Ekonomi Kreatif.

Ditanya mengenai target kerjanya ke depan, Ketua DPW PKB Jawa Barat ini mengatakan bahwa di bidang pendidikan, dirinya akan bersinergi dengan program-program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Namun, dia menekankan bahwa ada banyak hal yang harus diperjuangkan di bidang pendidikan di antaranya pemerataan kualitas pendidikan, gaji guru, dan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan. "Ya, kita tunggu terobosan menteri baru nanti," ucapnya, Senin (28/10).

Huda mengatakan, sesuai rekomendasi Muktamar Bali, isu pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus perhatian PKB. Hal ini juga sejalan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ketua Umum (Muhaimin Iskandar) *concern* betul soal pendidikan, peningkatan SDM unggul, termasuk pendidikan vokasi. Ini perlu didorong," tuturnya.

Di bidang pariwisata, pihaknya akan mendorong pemerintah dalam mewujudkan lima destinasi wisata prioritas, pada saat bersamaan juga harus didorong pembangunan desa-desa wisata sebagai wisata pendukung sehingga bisa memperbanyak destinasi pariwisata penyangga.

"Itu bisa dilakukan melalui pengembangan desa-desa pariwisata menuju destinasi yang bersangkutan sehingga jadi *alternative spot* . Misalnya di Danau Doba, di sana harus diciptakan *spot-spot* penyangga berupa desa wisata sehingga di sepanjang perjalanan wisatawan akan banyak opsi-opsinya. Itulah yang kita bayangkan wisata kita akan tumbuh. Kalau cuma mengandalkan destinasi di satu tempat, enggak mungkin itu bisa tumbuh. Dengan begitu pula, kita harapkan akan tumbuh ekonomi kreatif berbasis desa-desa, turis juga banyak alternatifnya," pungkasnya.

kiswondari/ abdul rochim